



**PILKADA**



**BERSIAP:** Suasana apel siaga pengawasan masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2024 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Jogja Jumat (22/11) sore.

**Gencarkan Patroli, Antisipasi Politik Uang di Masa Tenang**

**JOGJA** - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jogja menyebut potensi pelanggaran berupa politik uang bakal meningkat ketika memasuki masa tenang Pilkada 2024. Sebagai upaya antisipasi, lembaga tersebut bakal mengencarkan kegiatan patroli.

Ketua Bawaslu Kota Jogja Andie Kartala mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemetaan terhadap berbagai potensi pelanggaran saat masa tenang. Menurutnya, politik uang menjadi potensi pelanggaran yang harus diwaspadai. Sebab kasusnya kemungkinan akan meningkat.

*Baca Gencarkan... Hal 3*

**PILKADA 2024 DI KOTA JOGJA**

**651 TPS** **45** Pengawas Kelurahan **42** Panwascam

**HARI TENANG: 24-26 November 2024**

**Ayo Memilih!**

# Gencarkan Patroli, Antisipasi Politik Uang di Masa Tenang

*Sambungan dari hal 1*

Oleh karena itu, Andie memastikan, bahwa semua pengawas akan melakukan patroli ke lingkungan tempat pemungutan suara (TPS). Sehingga potensi-potensi pelanggaran selama masa tenang Pilkada 2024 bisa diantisipasi.

"Semua pengawas di masa tenang akan melakukan patroli ke lingkungan TPS, kecamatan dan kelurahan,

secara bergantian," ujar Andie di sela apel siaga pengawasan masa tenang Jumat (22/11) sore.

Dia pun memastikan, bahwa pengawas nantinya juga akan berkeliling di wilayah tugasnya. Upaya tersebut guna memastikan tidak ada pergerakan-pergerakan dari tim paslon maupun pihak-pihak lain yang berupaya melakukan politik uang.



Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jogja, Nindyo Dewanto menyampaikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga ketertiban selama masa tenang. Serta melaporkan kepada Bawaslu jika menemukan pelanggaran.

Menurut Nindyo, masa tenang merupakan waktu

bagi masyarakat untuk refleksi dan mengambil keputusan untuk memilih calon di Pilkada 2024. Namun selama masa itu bisa saja rawan terjadi dengan potensi pelanggaran, seperti politik uang, kampanye terse- lubung atau penyebaran hoaks. "Di sinilah peran penting pengawasan Bawaslu. Dalam konteks ini, saya ingin menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi di antara semua pihak," katanya. (inu/eno/by)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1.       | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 13 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005